



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : H. M. TAUFIK HAK
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 494353

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.520.000.000**

1. Tanah Seluas 390 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 377 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 582 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
6. Tanah Seluas 1100 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
7. Tanah Seluas 5926 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 265.000.000**

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER/JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2TP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	428.840.677
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.213.840.677
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.213.840.677

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.